



DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Alamat: Jl. Wahid Hasyim, Nomor 117, Jakarta Pusat, email : tudkpp@dkpp.go.id

 www.dkpp.go.id

 [dkpp_ri](https://www.instagram.com/dkpp_ri)

 [medsosdkpp](https://www.facebook.com/medsosdkpp)

 [@DKPP_RI](https://twitter.com/DKPP_RI)

 [DKPP RI](https://www.youtube.com/DKPP_RI)

RILIS DKPP

DKPP KEMBALI PERIKSA ANGGOTA KPU KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PADA 4 DESEMBER 2023

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan kembali menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 125-PKE-DKPP/X/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, pada Senin (4/12/2023) pukul 10.00 WITA.

Perkara ini diadukan Muh. Ridwan. Ia mengadukan Anggota KPU Kabupaten Pangkajene Kepulauan Hasanuddin G Kuna sebagai Teradu.

Teradu diduga melakukan seruan dukungan pada peringatan hari ulang tahun (HUT) pertama Partai Gelora dan Teradu diduga sebagai pengurus wilayah Partai Gelora Provinsi Sulawesi Selatan.

Sekretaris DKPP David Yama mengatakan, perkara 125-PKE-DKPP/X/2023 sudah diperiksa sebelumnya di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, pada 27 Oktober 2023.

Dalam sidang pertama, para Teradu menyebut bahwa dirinya tidak pernah menjadi kader Partai Gelora, melainkan kader dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kendati demikian, Teradu mengakui bahwa dirinya telah mengundurkan diri sebagai kader atau anggota PKS Kabupaten Pangkep pada 2017.

David mengungkapkan, dalam sidang kedua DKPP akan mendengarkan keterangan dari sejumlah Pihak Terkait, yaitu dari DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Sulawesi Selatan, DPD PKS Kabupaten Pangkep, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Sulawesi Selatan.

Ia menambahkan, DKPP telah memanggil para pihak secara patut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

“Sekretariat DKPP telah memanggil semua pihak secara patut dengan menyampaikan surat pemanggilan sidang lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” ungkap David.

David juga mengungkapkan, sidang ini bersifat terbuka untuk umum, baik masyarakat umum atau wartawan yang ingin meliput. Untuk memudahkan akses terhadap jalannya persidangan, sidang ini akan disiarkan secara langsung melalui akun Youtube dan Facebook resmi DKPP.

“Sehingga siapa pun dapat menyaksikan jalannya sidang pemeriksaan ini,” pungkas David. [Rilis Humas DKPP]

Sekretaris DKPP,



Dr. David Yama, M.Sc, MA
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19770606 200112 1 001